



Judul : RUU Pengelolaan Ruang Udara, frasa keselamatan masalah krusial
Tanggal : Selasa, 09 September 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

RUU Pengelolaan Ruang Udara Frasa Keselamatan Masalah Yang Krusial

SENAYAN tengah membahas Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengelolaan Ruang Udara. Salah satu isu penting yang disorot adalah penambahan frasa "keselamatan" dalam draf RUU tersebut.

Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU Ruang Udara Amelia Anggraini menilai, frasa itu penting untuk menegaskan bahwa ruang udara Indonesia harus dijaga. Tidak hanya dari aspek pertahanan dan keamanan negara, melainkan keselamatan penerbangan sipil dan masyarakat secara luas.

"Salah satu poin penting adalah usulan Pemerintah menambahkan frasa keselamatan. Bukan hanya pertahanan dan keamanan negara, tapi juga keselamatan negara," kata Amelia dalam keterangannya, Minggu (7/9/2025).

Amelia menyoroti lemahnya penegakan hukum akibat ketiadaan regulasi komprehensif. Pelanggaran ruang udara oleh pesawat asing maupun aktivitas lain masih marak terjadi.

"Pelanggaran ini bisa mengancam kedaulatan. Dengan RUU ini, semua aspek jelas, tegas dan ada kepastian hukumnya," ujarnya.

Dia menegaskan, RUU Ruang Udara merupakan ins-

trumen penting untuk memperkuat tata kelola ruang udara, menjamin pertahanan, keamanan, sekaligus keselamatan penerbangan. Karena RUU ini carry over dari periode sebelumnya, Pansus DPR berkomitmen menuntaskan pembahasan agar regulasi ini segera berlaku.

"Regulasi ini sempat sampai ke Pembicaraan Tingkat I, tapi belum disahkan karena keterbatasan waktu. Kami berkomitmen menyelesaikannya demi kedaulatan udara negara," tegas Ketua DPP Partai NasDem itu.

Ketua Pansus Endipat Wijaya menambahkan, RUU ini akan menjadi dasar hukum bagi Kementerian Perhubungan menyusun aturan turunan terkait perkembangan teknologi penerbangan.

"Dengan adanya RUU ini, Pemerintah memiliki landasan hukum mengatur perkembangan teknologi penerbangan dengan jelas. Termasuk taksi drone dan inovasi serupa di masa depan," jelasnya.

Endipat memastikan, RUU ini tidak mengubah kewenangan lembaga lain seperti Bea dan Cukai, Imigrasi, Kepolisian, Karantina, maupun TNI AU. Operasional lembaga-lembaga tersebut akan tetap berjalan sebagaimana mestinya. ■ **PYB**